

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) SEMESTER I TAHUN 2023  
(PERIODE JANUARI S.D JUNI 2023)**



**Selong, 03 Juli 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS PERHUBUNGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya sehingga alhamdulillah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2023 ini merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

Tersusunnya LKjIP Semester I ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu izinkan kami dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Harapan kami dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 ini kiranya dapat memberikan gambaran kepada Bupati Lombok Timur mengenai pelaksanaan tugas selama 6 (enam) bulan di Tahun 2023, selanjutnya dapat mengambil kebijakan dengan mengarah pada pencapaian Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

Selong, 03 Juli 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



**Drs. ISWAN RAKHMADI, M.M.**

Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19691286 198903 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Latar Belakang .....	1
1.2.    Dasar Hukum .....	1
1.3.    Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.4.    Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kab. Lotim .....	3
1.5.    Kepegawaian .....	8
1.6.    Isu Strategis / Permasalahan.....	10
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1.    Visi dan Misi .....	13
2.2.    Tujuan dan Sasaran .....	13
2.3.    Kebijakan .....	14
2.4.    Rencana Kerja Tahunan.....	15
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1.    Capaian Kinerja Organisasi .....	21
3.2.    Anggaran Pendapatan dan Realisasi.....	41
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
4.1.    Kesimpulan .....	46
4.2.    Saran dan Rekomendasi .....	46
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan negara harus mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menyelenggarakan pemerintahan yang Transparan, Partisipatif, Akuntabel, Berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari KKN.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur merupakan instansi yang membantu Bupati Lombok Timur dalam bidang Perhubungan sesuai instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan evaluasi terhadap Rencana Kerja kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan 2018-2023 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tujuan Penyusunan LKjIP Ini adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungannya bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas membantu Bupati Lombok Timur dalam Urusan Pemerintahan

Daerah di Bidang Perhubungan baik Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis Bidang Perhubungan;
2. Perumusan kebijakan teknis Bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, pengendalian dan operasional perhubungan darat dan laut;
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan;
5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di bidang Perhubungan;
6. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur mempunyai :

##### **1.4.1. Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala, dimana Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas Perhubungan dan 3 (Tiga) orang Kepala Bidang. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, meliputi sub bagian :

- ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - ✚ Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
- ✚ Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - ✚ Seksi Angkutan; dan
  - ✚ Seksi Keselamatan.
4. Bidang Prasarana, terdiri atas:
- ✚ Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - ✚ Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
  - ✚ Seksi Perawatan Prasarana.
5. Bidang Pengembangan dan Teknik, terdiri atas:
- ✚ Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - ✚ Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
  - ✚ Seksi Lingkungan Perhubungan.
6. UPT Pelabuhan Lokal Labuhan Haji.

#### **1.4.2. Tugas pokok dan Fungsi masing-masing sub unit**

##### **1.4.2.1. Tugas Pokok**

Tugas pokok masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.
2. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas :
  - ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha; dan

- ✚ Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
- ✚ Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan di daerah; dan
  - ✚ Seksi Keselamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan.
4. Bidang Prasarana mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana :
- ✚ Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan Pengoperasian Prasarana; dan
  - ✚ Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perawatan Prasarana di daerah.
5. Bidang Pengembangan dan Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Teknik :
- ✚ Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - ✚ Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

Kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Lingkungan Perhubungan.

#### **1.4.2.2. Fungsi**

Fungsi masing-masing sub unit adalah sebagai berikut :

##### **1. Sekretariat mempunyai fungsi :**

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- b. Penyusunan konsep rencana strategis Dinas;
- c. Penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan;
- d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- e. Penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
- h. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup Dinas;
- i. Penyusunan konsep kebijakan Dinas untuk pengelolaan program dan pelaporan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Prasarana**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana dan perawatan prasarana; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **4. Bidang Pengembangan dan Teknik**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan pengujian sarana dan terminal;

- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan pengujian sarana dan terminal; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.5. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan per 30 Juni 2023 berjumlah 43 orang dengan rincian laki-laki berjumlah 41 orang dan perempuan berjumlah 2 orang.

Bila dibandingkan dengan keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 yang berjumlah 43 orang, 2022 tidak ada perbedaan karena berjumlah sama yakni sebanyak 43 orang.

Jumlah PNS berdasarkan status pegawai dan Tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**

Jumlah karyawan/karyawati berdasarkan tingkat pendidikan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur keadaan 30 Juni 2023

No	Status Pegawai	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	Jumlah
1.	PNS	-	-	18	2	20	3	-	43
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	-	<b>43</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur termasuk sudah memadai untuk menangani berbagai persoalan perencanaan pembangunan di bidang Perhubungan dengan jumlah pegawai yang sudah berpendidikan Sarjana baik itu Sarjana Strata Satu (S1) maupun Sarjana

Strata Dua (S2) 53,48 persen dari total PNS yang ada. Dengan kata lain dengan kondisi pada saat ini dengan keadaan pegawai pada Dinas Perhubungan, kemampuan Dinas Perhubungan dalam bidang Perencanaan dianggap cukup teruji dengan dukungan yang sangat kuat dari pegawai yang ada apalagi dilihat dari jenjang pendidikan yang dimiliki oleh Karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sedangkan tenaga teknis yang khusus menangani perhubungan darat, laut dan sarana teknik masih sangat dibutuhkan tenaga teknis yang kualifikasinya sesuai dengan bidang tersebut (tenaga sesuai kualifikasi pendidikan masih sangat kurang).

Selanjutnya tabel 2 dibawah ini akan menguraikan jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

**Tabel 2**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan/Eselon pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Keadaan 30 Juni 2023

No	Pegawai/karyawan Menurut Jabatan/Eselon (Orang)						
	Jenis Kelamin	Eselon					Jumlah
		V	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Laki-laki	-	12	4	1	-	17
2.	Perempuan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	12	4	1	-	17

Berdasarkan data di atas, semua jabatan yang ada dalam Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sudah terisi.

## 1.6. Isu Strategis / Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Semester 1 Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

### ❖ **Sekretariat**

- Tidak dapat terselenggaranya bimbingan teknis bagi pegawai dalam Diklat Teknis Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut baik dalam daerah, provinsi maupun ditingkat pusat untuk meningkatkan SDM pegawai dinas perhubungan; dan
- Kurangnya tenaga di sub bagian keuangan dan pelaporan yang memiliki basic akuntansi.

### ❖ **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan**

Kurangnya Tenaga Teknis antara lain :

- Staf teknis yang menangani urusan manajemen rekayasa lalu lintas belum ada;
- Belumnya tersedianya tenaga PPNS bidang LLAJ; dan
- Kurangnya tenaga operator komputer.

### ❖ **Bidang Pengembangan dan Teknik**

a. Kurangnya tenaga teknis antara lain :

- Tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor; dan
- Tidak tersedianya anggaran untuk diklat penjenjangan kompetensi penguji kendaraan.

b. Kurang optimalnya hasil pengujian kendaraan bermotor :

- *Brake Tester*/Alat Uji Rem Utama Kendaraan, hasil uji efisiensi rem kiri dan kanan tidak berfungsi/rusak;
- *Axle Load Meter* tidak berfungsi (Rusak Berat); dan
- *Axle Play Detector*/Alat Uji Suspensi tidak berfungsi maksimal.

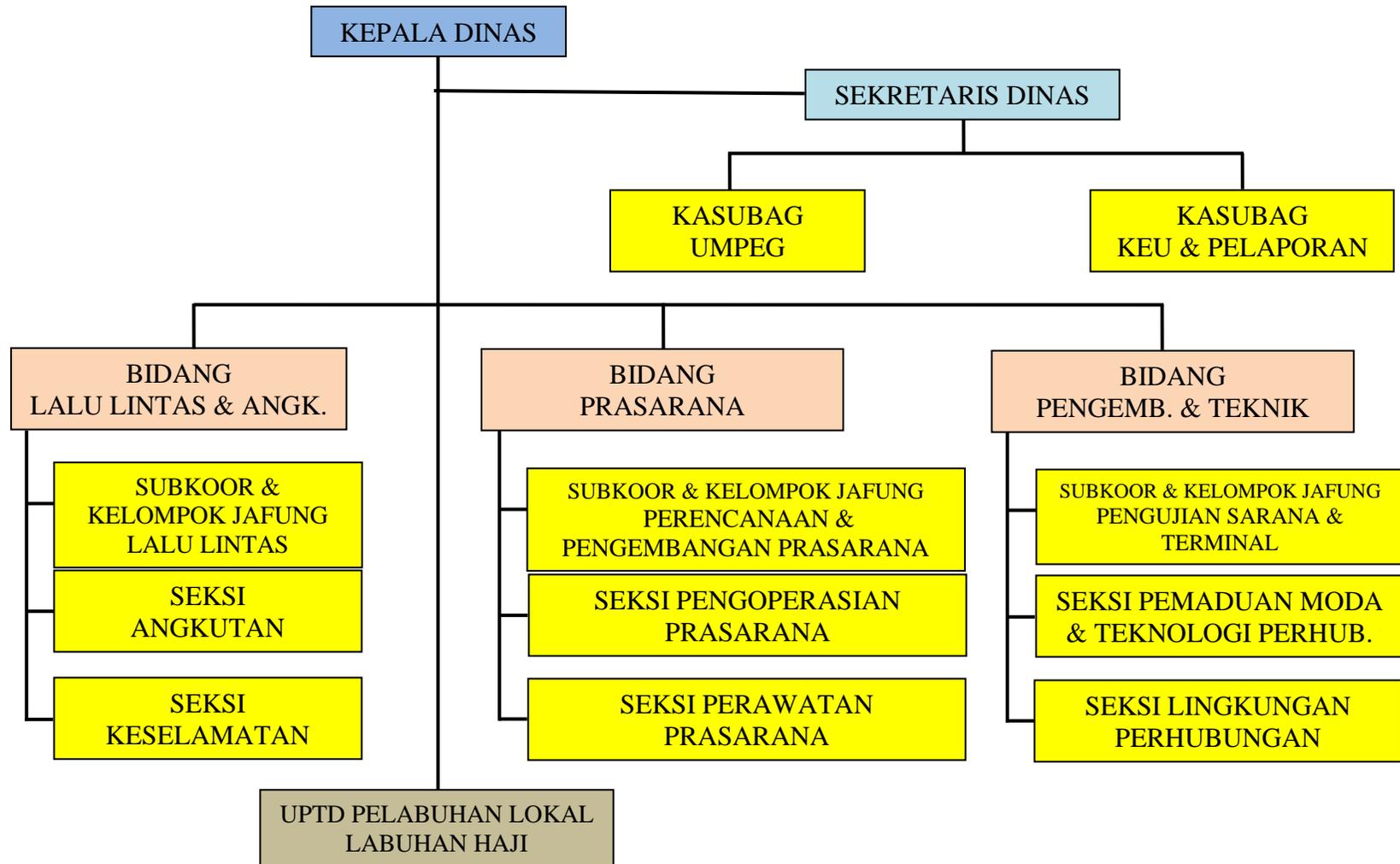
c. Gedung pelayanan pengujian kendaraan bermotor masih kurang representatif, seperti ruang tunggu pelayanan uji yang sempit dan kurang nyaman, tidak tersedianya toilet khusus bagi wajib retribusi pada ruang pelayanan;

- d. Belum maksimalnya perlengkapan standar keselamatan kerja bagi penguji kendaraan bermotor;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pada seksi Lingkungan Perhubungan, seperti peralatan keselamatan dan pendukung kegiatan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan; dan
- f. Tidak tersedianya staf yang memiliki kompetensi pemeliharaan APILL.

❖ **Bidang Prasarana**

- a. Kurangnya tenaga teknis :
  - Tenaga S1 Teknik Perkapalan;
  - Tenaga S1 Manajemen Transportasi Laut;
  - Tenaga Diploma IV/Diploma III Nautika ANT-III;
  - Tenaga Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan/KALK; dan
  - Diploma III Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga/Manajemen Transportasi Laut.
- b. Terbatasnya staf PNS, sehingga untuk berbagi tugas dan pelaksanaan kegiatan tidak efektif; dan
- c. Permasalahan pada bidang Prasarana dalam keterkaitannya dengan pelabuhan dapat dilihat sebagai berikut :
  - Seksi Pengoperasian Prasarana :
    1. Penarikan retribusi pas masuk, sewa fasilitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Jasa Kepelabuhanan; dan
    2. Pelabuhan Lokal Labuhan Haji :
      - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dermaga Pelabuhan Lokal Labuhan Haji, seperti gudang pelabuhan, fasilitas bongkar muat, dan lain-lain.

Grafik 1  
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Visi dan Misi**

Perencanaan pembangunan daerah hendaknya disesuaikan dengan paradigma baru dan memperhatikan keseimbangan dalam kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu Visi Kabupaten Lombok Timur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Lombok Timur kurun waktu tahun 2018-2023 adalah **“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN “**.

Untuk mencapai Visi diatas, maka **Misi Kabupaten Lombok Timur** adalah :

1. Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur Wilayah secara berimbang pada Bidang Transportasi, Energi, Irigasi, Air Bersih serta Perumahan;
2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang berdaya saing dan mutu pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau;
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya;
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga;
5. Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik dan religius, serta menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis; dan
6. Mendorong reformasi birokrasi yang sungguh –sungguh dan pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih, beorientasi kepada pelayanan publik.

#### **2.2. Tujuan dan Sasaran**

<b>VISI</b>	: Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman.
<b>MISI</b>	: Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.
<b>TUJUAN</b>	: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah secara Berimbang pada Bidang Transportasi Darat dan Laut.
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	: Indeks Sarana Perhubungan.

**SASARAN** : Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi.

**INDIKATOR** : Presentase Fasilitas Keselamatan Jalan.

**SASARAN**

### 2.3. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran diatas ditempuh berbagai kebijakan yaitu :

Sasaran Program	Indikator Program	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan
<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH (P1)</b>			
1. Terwujudnya Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang tepat, cepat, aman dan nyaman yang berkesinambungan secara terpadu dan menyeluruh Untuk Transportasi Nasional	Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai	Prosentase Kemantapan Sarpras perhubungan	Koordinasi terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peningkatan DAK, TP, APBN, APBD I dan APBD II
2. Meningkatkan pelayanan angkutan perkotaan dan pedesaan antar moda yang fleksibilitas, akurat, nyaman dan selamat	2.1 Tersedianya sarana prasarana wilayah yang seimbang/ proporsional 2.2 Tersedianya sistem jaringan transportasi yang memadai	Prosentase Kualitas Pelayanan dan Tingkat Koordinasi	Koordinasi, regulasi, konstruksi dan fasilitasi sistem jaringan transportasi yang diarahkan pada sistem jaringan lokal
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pelayaran	3.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, antar kota dan antar wilayah	Menerbitkan Izin Pembangunan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan lokal	Koordinasi, konsultasi, revitalisasi dan konstruksi sarana dan prasarana wilayah yang diarahkan pada sistem

<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	3.2 Tersedianya subsidi transportasi		perhubungan laut sesuai pengembangan sistem jaringan infrastruktur dalam Kabupaten Lombok Timur
<b>SASARAN PERANGKAT DAERAH (P2)</b>			
1. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya sarana prasarana Fasilitas keselamatan jalan	Prosentase sarana dan alat uji kendaraan bermotor yang siap pakai	Mengikuti sertakan Aparatur dalam berbagai kegiatan Diklat Profesi
2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatkan konektivitas antar pemangku kebijakan	Prosentase Terkendalinya Keamanan Lalu Lintas	Koordinasi dan Konsultasi

#### **2.4. Rencana Kerja Tahunan**

Rencana kerja tahunan yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tetap mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang bertugas membantu Bupati Lombok Timur dalam merencanakan, mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur termasuk melaksanakan tugas-tugas lain yang dipercayakan Bupati Lombok Timur.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 juga diarahkan dengan tetap mengacu pada terlaksananya dukungan pada tercapainya tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur selaku kordinator pembangunan khususnya dalam bidang Perhubungan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan diatas maka ditempuh berbagai program dan kegiatan pada tahun 2023 yaitu :

##### **2.4.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini diarahkan untuk mendukung dan meningkatkan jasa pelayanan perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

#### **2.4.2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Fasilitas Angkutan Darat dan Angkutan Laut yang terintegrasi dengan semua wilayah dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota; dan
7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### **2.4.3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

Program ini diarahkan Tersusunnya perencanaan hasil Penelitian/ survey tatanan transportasi lokal yang menjadi acuan pembangunan di Lombok Timur dengan kegiatan Sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah;
2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

**MATRIKS II. 1**  
**RENCANA STRATEJIK**

**INSTANSI** : Dinas Perhubungan  
**VISI** : Terwujudnya transportasi darat dan laut yang handal

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat dan laut	Menciptakan transportasi yang berbasis transportasi terpadu ITS (Intelegent Ttransport System)	Meningkatkan Fasilitas Angkutan Darat dan Angkutan Laut yang terintegrasi dengan semua wilayah	Terlayannya kebutuhan masyarakat dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan laut	Peningkatan kualitas pembangunan sektor transportasi darat dan laut baik sarana dan prasarana fasilitas keselamatan jalan dan pepadu moda antar simpul transportasi	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) - Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Mengembangkan Tata-tatanan Transportasi Lokal berbasis Transportasi Nasional	Tersusunnya hasil Penelitian/ survey tatanan tranportasi lokal yang menjadi acuan pembangunan di Lombok Timur	Laporan Hasil penelitian/survey tentang perkembangan transportasi secara kompleks di wilayah Lombok Timur	- Pemanfaatan rencana ruang secara optimal dan sinergis dengan wilayah sekitar	- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

MISI	TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	1	2	3	4	5
				- Peningkatan koordinasi Pusat, Propinsi dan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Mewujudkan E-Government yang menyeluruh	Terklaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terselesaikannya pelaksanaan program kegiatan tepat waktu	Peningkatan kualitas hasil pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**MATRIKS II. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur**

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur

Tugas Pokok : Membantu Bupati Lombok Timur dalam Penyelenggaraan Kewenangan di Bidang Perhubungan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur wilayah secara berimbang pada Bidang Transportasi Darat dan Laut	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda	Prosentase Kemantapan Sarpras perhubungan	Jumlah Sarpras Perhubungan dalam kondisi baik dibagi jumlah Sarpras Perhubungan x 100%	Bidang Pengembangan dan Teknik & Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Prosentase sarana dan alat uji kendaraan bermotor yang siap pakai	jumlah Sarana dan alat uji kendaraan yang siap pakai dibagi jumlah Sarana dan alat uji yang ada x 100	Bidang Pengembangan dan Teknik
		Prosentase Kualitas Pelayanan dan Tingkat Koordinasi	Jumlah Pengaduan/layanan yang tertangani dibagi Total Pengaduan/layanan x 100%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		Prosentase Terkendalinya Keamanan Lalu Lintas	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terbangun dibagi total kebutuhan x 100%	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
		Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap arti penting keselamatan Pelayaran	jumlah nelayan yang mendapatkan sosialisasi dibagi total nelayan x 100%	Bidang Prasarana

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan kegiatan dilakukan dengan menilai kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan yaitu menilai indikator-indikator kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil sebagaimana dituangkan dalam formulir pengukuran.

##### A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran indikator kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan indikator kuantitatif agar lebih terukur dan memudahkan evaluasi. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan sebagai mandat kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis (RPJMD)	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	<i>Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan</i>	<i>Indeks Sarana Prasarana Perhubungan</i>	0,22	0,24	90,91

Berdasarkan tabel diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan bulan Juni 2023 mencapai 90,91 persen Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan. Indikator kinerja tahun 2023 sebesar 0,24, belum mencapai 100 persen disebabkan karena volume kendaraan yang melalui jalan-jalan yang ada semakin meningkat dengan kapasitas jalan yang tetap, hal ini menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah kabupaten semakin baik dalam mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat.

#### **A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja OPD Tahun 2023 dengan 2 (dua) Tahun Sebelumnya**

Untuk memenuhi target IKU Kepala Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur menetapkan Sasaran Strategis **“Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi”** dengan indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 adalah **“Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang dibagi Jumlah Fasilitas yang dibutuhkan”**. Adapun uraian capaian Kinerja sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Bulan Juni Tahun 2023			Tahun Sebelumnya	
				Target (%)	Realisasi (%)	%	2022	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan</i>	<i>Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terpasang dibagi Jumlah Fasilitas</i>	%	52,33	45,76	87,45	42,22	39,96

<i>Nilai Tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas antar simpul dan moda transportasi</i>	<i>yang dibutuhkan</i>						
---	------------------------	--	--	--	--	--	--

### **A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah**

Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang Aspiratif, Akomodatif, Inovatif dan Berkualitas. Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung keberhasilan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kabupaten Lombok Timur target jangka menengah adalah ***“Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi”***. Adapun realisasi kinerja sampai dengan bulan juni tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah berdasarkan perencanaan strategis organisasi diuraikan pada tabel berikut ini :

<b>Sasaran Strategis (RPJMD)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi</b>			<b>Target Akhir Renstra</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Juni 2023</b>	
<i>Meningkatkan hasil pembangunan infrastruktur wilayah berdasarkan rencana secara berimbang pada bidang</i>	<i>Indeks Sarana Prasarana Perhubungan</i>	0,24	0,24	0,24	0,20

<i>transportasi, energi, irigasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang berwawasan lingkungan</i>					
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian indikator kinerja belum mencapai 100 persen dari target 0,22 yang ditetapkan pada tahun 2023 (berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah) tercapai 0,24 (91,66%), Pada tahun 2021 target terhadap Indeks Sarana dan Prasarana Perhubungan sebesar 0,24 (100%), sehingga jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dan bulan juni tahun 2023 terdapat selisih 0,22.

Hal positif yang dapat diambil dari capaian indikator kinerja tahun 2022 dan capaian sampai dengan bulan juni tahun 2023, dimana terdapat selisih dari capaian pada tahun 2021 adalah menunjukkan bahwa konektivitas antar wilayah kabupaten semakin baik dalam mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat, karena volume kendaraan semakin bertambah yang melewati jalan-jalan yang ada sementara kapasitas jalan tetap.

Adapun target dan realisasi indikator masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut :

No.	Program	Satuan	Target	Realisasi (%)	Persentase (%)
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	<b>100</b>	<b>48,23</b>	<b>48,23</b>
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	%	100	49,15	49,15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	588	287,36	48,87
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dokumen	12	7,20	60,00

	Keuangan SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Laporan	16	0	0
2.	<i>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</i>	%	100	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6	0	0
3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	%	100	0	0
	Monitoring, Evaluasi , dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	0	0
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	%	100	20,59	20,59
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Paket	35	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	95	19,58	20,61
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	30	30,00	0
	Penyediaan Logistik Kantor	Paket	1000	0	0
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Paket	47	0	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - perundangan	Dokumen	3	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	156	32,08	20,57
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	%	100	0	0
	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	unit	18	0	0
6.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	100	48,97	49,97
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	4,42	36,83

	Daya Air dan Listrik				
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	5,97	49,76
7.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	100	36,30	36,30
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Unit	27	9,80	36,30
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	0	0
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	%	<b>82</b>	<b>46,33</b>	<b>56,50</b>
8.	<i>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/Kota</i>	%	80	0	0
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0
9.	<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota</i>	%	80	11,93	14,91
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	unit	6	0	0
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	unit	80	11,93	14,91
10.	<i>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</i>	%	100	0	0
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Dokumen	3	0	0
11.	<i>Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</i>	%	75	64,67	86,23
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan	Laporan	12	10,35	86,23

	dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota				
12.	<i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	%	80	58,68	73,36
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	8	8,00	100
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala	Unit	7951	1.807,14	22,73
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Dokumen	5500	2.812,03	51,13
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	8	4,46	55,81
13.	<i>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	%	80	0	0
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Daerah Kabupaten / Kota	Laporan	100	0	0
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	100	0	0
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	Laporan	12	0	0
14.	<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	%	100	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang antar Kota Dalam 1 ( Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	18	0	0

III.	Program Pengelolaan Pelayaran	%	78	78,00	100
15.	<i>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah</i>	%	0	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0
16.	<i>Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoprasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	%	0	0	0
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan persetujuan Pengoprasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Laporan	0	0	0
17.	<i>Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal</i>	%	78	78,00	100
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Unit	2	2,00	100
	Pengawasan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Laporan	0	0	0

#### **A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional**

*LOS (Level of Service)* atau tingkat pelayanan jalan adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan

yang menjadi indikator dari kemacetan. Suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan nilai mendekati 1. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas jalan (C) yang dapat dihitung dengan mengetahui kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota (MKJI, 1997).

Volume adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada suatu jalur gerak per satuan waktu yang biasanya digunakan satuan kendaraan per-waktu (Morlok, 1978). Satuan yang digunakan dalam menghitung volume lalu lintas (V) adalah Satuan Mobil Penumpang (SMP). Untuk menunjukkan volume lalu lintas pada suatu ruas jalan maka dilakukan dengan pengalihan jumlah kendaraan yang menggunakan ruas jalan tersebut dengan faktor Ekuivalensi Mobil Penumpang (EMP). Ekuivalensi mobil penumpang (EMP) adalah satuan arus lalu lintas dari berbagai tipe kendaraan yang diubah menjadi kendaraan ringan (termasuk mobil penumpang) dengan menggunakan faktor EMP dan nilai EMP merupakan faktor konversi dari berbagai jenis kendaraan.

*Level of Service (LOS)* dapat diketahui dengan melakukan perhitungan perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas dasar jalan (V/C). Dengan melakukan perhitungan terhadap nilai LOS, maka dapat diketahui klasifikasi jalan atau tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan tertentu.

Berikut tabel tingkat pelayanan yang telah dijabarkan berdasarkan MKJI :

No.	Tingkat Pelayanan	Rasio V/C	Karakteristik
1.	A	< 0,60	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi,

			pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.
2.	B	$0,60 < V/C < 0,70$	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.
3.	C	$0,70 < V/C < 0,80$	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas.
4.	D	$0,80 < V/C < 0,90$	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.
5.	E	$0,90 < V/C < 1$	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.
6.	F	$>1$	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi arus jalan di Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2023 berada pada tingkat pelayanan kategori A karena masih berada pada angka 0,24 (realisasi sampai bulan Juni tahun 2023), jauh dibawah angka 0,60 sebagai nilai standar pada tingkat pelayanan di kategori A. Artinya bahwa kondisi arus jalan secara umum di Kabupaten Lombok Timur dalam kondisi arus bebas, volume masih rendah dan pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.

#### **A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi**

1. Terkait dengan kenaikan persentase capaian realisasi kinerja sampai pada bulan juni tahun 2023, disebabkan oleh bertambahnya lahan parkir di Kabupaten Lombok Timur, dimana pada tahun 2022 tercatat sejumlah 143 lokasi area parkir dan pada bulan juni tahun 2023 mengalami kenaikan sejumlah 291 lokasi area parkir dengan rincian jumlah lokasi

parkir tepi jalan sebanyak 154 dan lokasi khusus parkir sebanyak 137. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan adalah dengan melakukan survei-survei potensi area parkir di sejumlah ruas jalan, tempat-tempat pariwisata, rumah makan, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha yang menyediakan tempat parkir. Sampai pada bulan juni tahun 2023 mengalami penurunan disebabkan karena beberapa dari pihak ketiga yang ditunjuk kurang menguasai situasi di lapangan dan kurangnya koordinasi dengan juru parkir yang berada dalam wilayah MoU, dimana dalam MoU tersebut pun tidak diuraikan jumlah setoran pada setiap bulannya sebagaimana jumlah MoU yang disepakati (hanya diberi batas tenggang waktu sampai akhir tahun). Sehingga kedepan diharapkan perlunya segera disusun/diterbitkan dasar hukum yang menguatkan pelaksanaan retribusi parkir, baik pada lokasi parkir tepi jalan maupun pada lokasi parkir tempat khusus serta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai anggaran; dan

2. Realisasi anggaran sampai pada bulan juni tahun 2023 masih terbilang cukup karena sudah mencapai 49,77 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.690.180.088,- dari pagu anggaran sebesar Rp.7.415.197.152,-.

#### **A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penggunaan Sumber Daya yang relatif efisiensi tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupten Lombok Timur, hal ini disebabkan karena tidak sebanding banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja

yang menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah sumber daya aparatur yang ada. Akan tetapi kekurangan sumber daya aparatur tersebut sedikit terbantu dengan keberadaan tenaga pendukung kegiatan yang ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Timur berdasarkan perjanjian kerja setiap tahunnya.

Begitu juga dengan keterbatasan sarana prasarana keselamatan jalan yang sampai pada bulan juni tahun 2023 tercatat sebanyak 12.789 buah dari 27.945 buah yang harus dimiliki agar keselamatan jalan dapat terwujud secara optimal. Kedepan hal ini akan menjadi prioritas untuk meningkatkan asset sarana prasarana keselamatan jalan yang harus dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur, yang akan dimulai dengan penyusunan database sarana prasarana keselamatan jalan yang akan menghimpun seluruh data sarana prasarana keselamatan jalan baik berupa Rambu Lalu Lintas, Guadrill, Marka Jalan, Lampu Penerangan Jalan, RPPJ, Traffic Light, ZOSS dan Road Barrier.

#### **A.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Kinerja**

Pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sampai bulan juni tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Program ini diarahkan dengan sasaran untuk memperlancar tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam hal Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Bensin, Listrik, Alat Komunikasi Gaji Pegawai, Tunjangan dan lain-lainnya. Untuk Mendukung program yang ada, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

❖ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan didukung oleh penyiapan anggaran sebesar Rp.3.759.673.712,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.837.396.969,- atau sebesar 48,87 persen;

❖ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.123.876.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.507.960,- atau 20,59 persen;

❖ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini Dengan dana sebesar Rp.1.989.133.440,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.973.984.494,- atau sebesar 48,97 persen; dan

❖ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.132.936.000,- dengan realisasi sebesar Rp.48.252.365,- atau realisasi 36,30 persen;

**b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini diarahkan untuk mendukung sarana prasarana perhubungan baik Fasilitas Keselamatan Jalan, Pengelolaan Angkutan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengelolaan Perparkiran, dan Pengelolaan Terminal Tipe C. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah :

❖ **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**

Dengan dana sebesar Rp.474.800.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp.70.790.000,- atau 14,91 persen;

❖ **Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

Dengan pagu dana sebesar Rp.90.588.000,- dengan realisasi keuangan Rp.78.110.000,- atau sebesar 86,23 persen; dan

❖ **Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Dengan anggaran sebesar Rp.734.290.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.585.438.300,- atau presentase sebesar 79,73 persen;

**c. Program Pengelolaan Pelayaran.**

Program ini diarahkan untuk Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Tepat, Cepat, Aman dan Nyaman yang Berkesinambungan secara Terpadu, menyeluruh dan tersedianya dokumen izin operasional rencana induk kepelabuhan DLKp dan DLKr untuk Pelabuhan Lokal Labuhan Haji. Kegiatan untuk mendukung program ini adalah:

❖ **Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**

Anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan ini sebanyak Rp.11.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.900.000,- atau presentase sebesar 100 persen.

## **A.8. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur sampai dengan bulan juni tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ **Sekretariat**

- Tidak dapat terselenggaranya bimbingan teknis bagi pegawai dalam Diklat Teknis Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut baik dalam daerah, provinsi maupun ditingkat pusat untuk meningkatkan SDM pegawai Dinas Perhubungan; dan
- Kurangnya tenaga di sub bagian keuangan dan pelaporan yang memiliki basic akuntansi.

❖ **Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLA)**

Kurangnya Tenaga Teknis antara lain :

- Staf teknis yang menangani urusan manajemen rekayasa lalu lintas belum ada;
- Kurangnya tenaga PPNS Bidang LLA;
- Petugas parkir tidak sebanding dengan jumlah lokasi parkir yang ada, sehingga potensi lokasi-lokasi parkir yang baru belum terdata secara efektif dan efisien; dan
- Belum adanya database pendataan fasilitas keselamatan jalan yang lebih baik.

❖ **Bidang Pengembangan dan Teknik**

a. Kurangnya tenaga teknis antara lain :

- Tenaga Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor; dan
- Tidak tersedianya anggaran untuk Diklat Penjenjangan Kompetensi Penguji Kendaraan.

b. Kurang optimalnya hasil Pengujian Kendaraan Bermotor:

- *Brake Tester*/Alat Uji Rem Utama Kendaraan, hasil uji efisiensi rem kiri dan kanan tidak berfungsi/rusak;
- *Axle Load Meter* tidak berfungsi (Rusak Berat); dan
- *Axle Play Detector*/Alat Uji Suspensi tidak berfungsi maksimal.

c. Gedung Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak representatif, seperti kurang tersedianya toilet khusus bagi wajib retribusi pada ruang pelayanan;

- d. Belum maksimalnya perlengkapan standar keselamatan kerja bagi penguji kendaraan bermotor; dan
- e. Tidak tersedianya staf yang memiliki kompetensi pemeliharaan APILL.

❖ **Bidang Prasarana**

- a. Kurangnya Tenaga Teknis :
  - Tenaga S1 Teknik Perkapalan;
  - Tenaga S1 Manajemen Transportasi Laut;
  - Tenaga Diploma IV/Diploma III Nautika ANT-III; dan
  - Tenaga Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan/KALK;
- b. Terbatasnya staf PNS, sehingga untuk berbagi tugas dan pelaksanaan kegiatan tidak efektif; dan
- c. Permasalahan pada bidang prasarana dalam keterkaitannya dengan kepelabuhanan yakni masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung Dermaga Pelabuhan Lokal Labuhan Haji, seperti gudang pelabuhan fasilitas bongkar muat.

Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

❖ **Sekretariat**

- a. Bersurat ke OPD yang menangani pengadaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) baik tingkat daerah, provinsi maupun tingkat pusat;
- b. Adanya Sarana dan Parasara untuk menunjang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bimbingan Teknis yang dilaksanakan Pusat maupun Provinsi di Masing-masing Kabupaten/Kota; dan

- c. Mengusulkan ke Pemerintah Daerah terkait pengadaan pegawai dan penunjukan pejabat yang menangani keuangan sesuai kualifikasi pendidikan akuntansi.

❖ **Lalu Lintas dan Angkutan**

- a. Segera dilakukan penambahan sumber daya yang berkualitas dan memiliki kemampuan teknis di Bidang Perhubungan Darat sesuai kualifikasi Pendidikan Perhubungan Darat seperti lulusan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat);
- b. Melakukan survei angkutan umum sebagai data induk (database);
- c. Pendataan ulang tempat parkir dan lahan parkir yang ada serta pemanfaatannya, atas retribusi yang telah dikeluarkan termasuk petugas parkir;
- d. Mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengisi jabatan yang kosong pada seksi bimbingan keselamatan dan pengendalian operasional pada bidang perhubungan darat; dan
- e. Mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dapat menganggarkan biaya diklat PPNS untuk bidang LLA;

❖ **Bidang Pengembangan dan Teknik**

- a. Mengusulkan ke Pemerintah Daerah terkait pengadaan ASN yang memiliki kualifikasi khusus bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (lulusan DII/DIII PKB) dan Penganggaran Diklat PKB Kompetensi Dasar dan Kompetensi jenjang berikutnya;
- b. Menyediakan anggaran secara rutin setiap tahun untuk perbaikan dan pemeliharaan peralatan uji kendaraan dan pembelian alat baru untuk mengganti alat uji yang rusak berat;
- c. Menyediakan anggaran untuk pembangunan dan renovasi gedung pelayanan pengujian yang representatif

- untuk kenyamanan wajib retribusi pelanggan saat menunggu pelayanan pengujian kendaraan; dan
- e. Mengusulkan ke Pemerintah Daerah terkait penganggaran Diklat Teknisi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas/Traffic Light).

❖ **Bidang Prasarana**

- a. Penambahan Tenaga Teknis S1 Teknik Perkapalan;
- b. Penambahan Tenaga Teknis S1 Manajemen Transportasi Laut;
- c. Penambahan Tenaga Teknis Diploma IV Nautika/Diploma II Nautika ANT-III;
- d. Penambahan Tenaga Teknis D-IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
- e. Penambahan Staf PNS di Bidang Perhubungan Laut;
- f. Penganggaran di APBD/APBN terhadap pemeliharaan fasilitas pelabuhan labuhan haji agar kapal aman untuk bongkar muat di pelabuhan;
- g. Penggantian Rambu Suar pelabuhan yang sesuai standar IALA (*International Association of Lighthouse Authorities*); dan
- h. Fasilitas perlu dilengkapi sesuai persyaratan Kepelabuhanan antara lain gudang pelabuhan, mushalla dan fasilitas bongkar muat.

Selain solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada seperti yang telah diuraikan diatas, adapun beberapa inovasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang sudah diterapkan untuk mendukung keberhasilan dan pencapaian target Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melalui Sub Bidang Angkutan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Lombok Timur

Nomor : 188.45/558/HUB/2022 tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang dikelola pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, dimana Keputusan ini untuk dijadikan bahan dan rujukan dalam pengelolaan perparkiran yang lebih baik kedepannya.

2. Di Bidang Pengembangan dan Teknik pada Sub Bidang Pengujian Sarana dan Terminal, telah dilakukan upaya yang lebih baik, baik untuk pihak wajib uji Kendaraan Bermotor yang akan melakukan pengujian kendaraan bermotornya maupun untuk pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dalam hal pelaporan, diantara upaya yang telah dilakukan adalah :
  - a) Pendaftaran yang akan dilakukan oleh wajib uji kendaraan bermotor tidak hanya secara manual, akan tetapi dapat dilakukan secara online melalui scan QR;



- b) Pembayaran dilakukan secara non tunai melalui EDC, Qris dan M Banking (yang sudah dikerjasamakan dengan PT. Bank NTB) dengan nomor Rekening 0020100006256 (An. Dishub Retribusi PKB); dan

- c) Seluruh Aktivitas pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan pelaporannya terbaca secara otomatis melalui Aplikasi SIM PKB



## B. Realisasi Anggaran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur pada tahun anggaran 2023 sebanyak 8 (delapan) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dari hasil pengukuran terhadap kegiatan sampai dengan bulan juni tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan mencapai hasil yang cukup baik dimana semua kegiatan bisa diukur indikator kinerjanya, baik indikator input, output maupun indikator hasil.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur secara garis besar dibagi dalam 2 jenis yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang perbandingannya dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

**TABEL 1**  
**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA**  
**DAN REALISASI PERIODE JANUARI S/D 30 JUNI 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Pendapatan	9.000.000.000	941.142.877	10,46
2	Belanja	7.415.197.152	3.690.180.008	49,77
<b>Surplus/(defisit)</b>		<b>1.584.802.848</b>	<b>2.749.037.211</b>	<b>57,65</b>

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 periode sampai dengan juni 2023 di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur diberikan Target realisasi Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

**B.1. Anggaran Pendapatan dan Realisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur ditargetkan menerima pemasukan asli pendapatan daerah Tahun 2023 sebesar: Rp.9.000.000.000,- yang mana dalam pencapaian target realisasinya sampai dengan triwulan ke 2 tahun 2023 yaitu dapat di lihat pada Tabel 2 di bawah ini :

**TABEL 2**  
**RENCANA TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN SAMPAI JUNI 2023**

No.	Uraian	Target Triwulan (Rp.)	Capaian (Rp.)	Persentase (%)
1.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan I	1.350.900.000	554.369.827	41,04
2.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan II	2.549.700.000	386.773.050	15,17
3.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan III	2.549.700.000	-	-
4.	Pendapatan Asli Daerah Triwulan IV	2.549.700.000	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>941.142.877</b>	<b>10,46</b>

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah dari yang ditargetkan kepada Dinas Perhubungan sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar 10,46 persen atau Rp.941.142.877,- (*Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), hal ini disebabkan beberapa faktor untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini :

**TABEL 3**  
**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**SAMPAI BULAN JUNI 2023**

No.	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi Per 30 Juni 2023 (Rp)	Persentase (%)
1.	<b>Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan Umum</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>74.620.000</b>	<b>4,97</b>
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	74.620.000	4,97
2.	<b>Retribusi pengujian kendaraan bermotor</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>403.709.200</b>	<b>13,46</b>
	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	3.000.000.000	403.709.200	13,46
3.	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>441.013.677</b>	<b>14,23</b>
	Retribusi tempat khusus parkir	2.350.000.000	318.479.000	13,55
	Retribusi pelayanan kepelabuhan	750.000.000	122.534.677	16,34
4.	<b>Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan</b>	<b>1.400.000.000</b>	<b>21.800.000</b>	<b>1,56</b>
	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.400.000.000	21.800.000	1,56
<b>JUMLAH</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>941.142.877</b>	<b>10,46</b>

Dari tabel di atas dapat terlihat komposisi PAD yang menjadi target Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur. Capaian kinerja keuangan dari Pendapatan Asli Daerah tidak dapat memenuhi target sampai dengan 30 Juni 2023 disebabkan oleh adanya kevakuman pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor selama 3 (tiga) bulan karena harus melakukan akreditasi dan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan diberlakukannya SIM PKB berbasis RFID oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat.

Untuk Parkir terutama parkir tepi jalan umum terkendala oleh beberapa dari pihak ketiga yang ditunjuk kurang menguasai situasi di lapangan dan kurangnya koordinasi dengan juru parkir yang berada dalam wilayah MoU, dimana dalam MoU tersebutpun tidak diuraikan jumlah

setoran pada setiap bulannya sebagaimana jumlah MoU yang disepakati (hanya diberi batas tenggang waktu sampai akhir tahun).

Sedangkan untuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhan baru mencapai target sebesar 16,34 persen sampai dengan bulan juni 2023 karena kapal yang bertonase besar yang bersandar sangat terbatas dan di tambah hanya melalui pas masuk pelabuhan.

## **B.2. Anggaran Belanja dan Realisasi**

Ikhtisar realisasi pencapaian target Anggaran Belanja Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat di uraikan sebagai berikut :

- Anggaran Belanja sebesar Rp.7.415.197.152,- dengan komposisi belanja Operasi sebesar Rp.7.019.697.152,- dan belanja Modal sebesar Rp.395.500.000,- diuraikan pada tabel 4 di bawah ini :

**TABEL 4**  
**ANGGARAN BELANJA DAN REALISASI**  
**PERIODE JANUARI s/d 30 JUNI 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>7.019.697.152</b>	<b>3.302.180.088</b>	<b>47,04</b>
- Belanja Pegawai	3.857.673.712	1.896.196.969	49,15
- Belanja Barang dan Jasa	3.162.023.440	1.405.983.119	44,46
- Belanja Hibah	0	0	0
- Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
<b>Belanja Modal</b>	<b>395.500.000</b>	<b>388.000.000</b>	<b>98,10</b>
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	395.500.000	388.000.000	98,20
- BM Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>7.415,197.152</b>	<b>3.690.180.088</b>	<b>49,77</b>

Belanja Pegawai yaitu belanja gaji PNS dan Tunjangan terealisasi 49,15 persen dan Belanja Barang Jasa terealisasi 44,46 persen dan sementara itu untuk Belanja Hibah masih belum terealisasi.

Perbandingan Belanja Operasional yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Modal dapat dilihat dari Tabel 5 Berikut ini :

**TABEL 5**  
**PERBANDINGAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA**  
**PERIODE JANUARI s/d 30 JUNI 2023**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Operasional	7.019.697.152	3.302.180.088	47,04
2.	Belanja Modal	395.500.000	388.000.000	98,10
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>7.415,197.152</b>	<b>3.690.180.088</b>	<b>49,77</b>

Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur yang dibagi untuk Belanja Langsung dan Belanja Langsung yang diperuntukkan dalam 8 Kegiatan dapat dijelaskan seperti pada tabel 6 berikut :

**TABEL 6**  
**KEGIATAN DAN REALISASI PERIODE JANUARI s/d 30 JUNI 2023**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran 1 Tahun (Rp)	Realisasi s.d Juni 2023 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.857.673.712	1.896.196.969	49,15
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	0	0
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.876.000	25.507.960	20,59
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.989.133.440	973.984.494	48,97
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.936.000	48.252.365	36,30
9.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ kabupaten/Kota	0	0	0
10.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	474.800.000	70.790.000	14,91
11.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0
12.	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	90.588.000	78110000	86,23
13.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	0	0	0
14.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0
15.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	734.290.000	585.438.300	79,73
16.	Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	11.900.000	11.900.000	100

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur Semester 1 tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dari hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 14 (empat belas) Subkegiatan Tahun 2023, pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan cukup memuaskan, karena kegiatan yang dilaksanakan realisasi keuangannya mencapai 35,77 persen
- b. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur dapat diukur indikator kinerjanya baik indikator *Input*, *Output* maupun *Outcomes*. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Lampiran I.
- c. Keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari sinergi yang mantap antar sektor dan semua unit kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur.

### **4.2. Saran dan Rekomendasi**

Berkenaan dengan apa yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka beberapa saran/rekomendasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus-menerus khususnya aparatur guna membentuk citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi,

sehingga mampu meningkatkan kinerjanya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi;

- b. Lebih mengedepankan konsep pembangunan dan peningkatan keselamatan dalam berlalu lintas, peningkatan informasi pelayanan publik, partisipatif, akumulatif dan sustainable;
- c. Semakin menekankan fungsi dari dokumen-dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sebagai guidelines pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan, terutama perlu adanya Tatralok (Tatanan Transportasi Lokal) Wilayah Kabupaten Lombok Timur sehingga arah pembangunan transportasi yang handal di daerah menjadi semakin jelas dan berkesinambungan; dan
- d. Dukungan personil dan anggaran yang memadai dalam upaya peningkatan pelaksanaan kegiatan dan kesinambungan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk dapat berjalan dengan baik dan lancar.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PERIODE JANUARI S.D JUNI TAHUN 2023**  
**DINAS PERHIBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NO	M I S I	SASARAN PROGRAM	SUBKEGIATAN				% Pencapaian Target	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberi Nilai Tambah dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Antar Simpul dan Moda Transportasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input : Tersedianya dana	Rp	3.759.673.712	1.200.426.450	31,93
				Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	588	185,76	31,59
				Outcomes : Persentase Penatausahaan keuangan sesuai rencana	%	100	31,59	31,59
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Input : Tersedianya dana	Rp	98.000.000	58.800.000	60,00
				Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	6	50,00
				Outcomes : Persentase Penatausahaan keuangan sesuai rencana	%	100	50	50,00
			3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Tersedianya dana	Rp	65.626.000	10.622.000	16,19
				Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	95	18,45	19,42
				Outcomes : Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	19,42	19,42
			4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input : Tersedianya dana	Rp	58.250.000	11.980.160	20,57
				Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	156	29,24	18,74
				Outcomes : Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	18,74	18,74
			5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input : Jumlah dana	Rp	122.400.000	22.792.504	18,62
				Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2,48	20,67
				Outcomes : Persentase capaian layanan jasa penunjang	%	100	20,67	20,67
			6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input : Jumlah dana	Rp	1.866.733.440	615.273.119	32,96
				Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3,70	30,83
				Outcomes : Persentase capaian layanan jasa penunjang	%	100	30,83	30,83

NO	M I S I	SASARAN PROGRAM	SUBKEGIATAN				% Pencapaian Target	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input : Jumlah dana	Rp	132.936.000	32.976.440	24,81
			Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	5,62	20,81	
			Outcomes : Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	%	100	20,81	20,81	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib dan Aman	1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Input : Jumlah dana	Rp	474.800.000	70.790.000	14,91
				Output : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	80	11,93	14,91
				Outcomes : Persentase terpeliharanya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	%	80	14,91	18,64
			2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Input : Jumlah Dana	Rp	90.588.000	78.110.000	86,23
				Output : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	11,24	93,67
				Outcomes : Persentase terdatanya jumlah juru parkir di masing-masing area parkir	%	75	70,25	93,67
			3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana	Rp	320.000.000	320.000.000	100,00
				Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	8	8	100,00
				Outcomes : Kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	%	80	80	100,00
		4 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana	Rp	19.161.000	4.355.000	22,73	
			Output : Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	7.951	1.807,14	22,73	
			Outcomes : Kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	%	80	18,18	22,73	

NO	MISI	SASARAN PROGRAM	SUBKEGIATAN				% Pencapaian Target	
			Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	
			5 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana	Rp	133.000.000	68.000.000	51,13
				Output : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	5.500	2.812,03	51,13
				Outcomes : Kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	%	80	40,90	51,13
			6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Input : Jumlah Dana	Rp	262.129.000	146.290.000	55,81
				Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	8	4,46	55,75
				Outcomes : Kendaraan yang laik uji di jalan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas	%	80	44,60	55,75
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Pelayaran yang Tertib dan Aman	1 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Input : Jumlah Dana	Rp	11.900.000	11.900.000	100,00
				Output : Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	unit	2	2	100,00
				Outcomes : Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	%	75	75	100,00
<b>JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>						<b>7.415.197.152</b>	<b>2.652.315.673</b>	<b>35,77</b>

Selong, 03 Juli 2023



Catatan Ketidaktercapaian Target :

1. Untuk Indikator Kinerja yang tidak mencapai target sampai 100 % merupakan sisa anggaran yang tidak direalisasikan.